

BAB V
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TUAN GURU DATO' HAJI NIK ABDUL
AZIZ BIN NIK MAT

A. Konsep Politik Islam di Malaysia

1. Pola Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam

Pola sistem politik dalam pemerintahan Islam khususnya di Malaysia dapat diartikan sebagai negara dengan menganut sistem demokrasi yaitu bukan merupakan negara Islam (murni) walaupun agama Islam sebagai agama resmi, terdapat perbedaan dengan konsep ketatanegaraan Islam dalam hal hak-hak politik. Dalam perkembangan perpolitikan Malaysia tidak disebutkan syarat-syarat seorang Perdana Menteri (kepala pemerintahan) harus orang Melayu (Islam), dapat diartikan non Melayu diberikan hak untuk menjadi Perdana Menteri jika memungkinkan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan konsep ketatanegaraan dalam Islam yang mensyaratkan seorang Kepala Negara harus orang Islam.

Pembahasan ini lebih menekankan kepada sistem Pemerintahan Raja atau dikenal dengan sistem Pemerintahan Monarki. Sistem pemerintahan Islam tidak membentuk monarki, maupun yang sejenis dengan sistem monarki. Pemerintahan sistem Monarki menerapkan sistem waris (putera mahkota). Yang mana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya, seperti mewariskan harta warisan. Sistem monarki telah memberikan hak-hak tertentu serta hak-hak istimewa khusus untuk raja saja, yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Sistem ini

juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, dimana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Raja kadang hanya merupakan simbol bagi masyarakat dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, seperti raja-raja di Eropa. Atau kadang kala menjadi raja yang berkuasa penuh, bahkan menjadi sumber hukum.¹

Kedudukan sistem monarki di Malaysia adalah Yang di Pertuan Agung sebagai Kepala Negara. Dia mempunyai keutamaan yang lebih dari pada orang lain di Malaysia dan tidak bisa didakwa dalam putusan mahkamah apapun kecuali dalam mahkamah khusus. Yang di-Pertuan Agung merupakan seorang raja Melayu yang dipilih oleh majelis raja-raja yang mengikuti peraturan yang terkandung dalam jadwal III perkembangan Malaysia. Setiap raja Melayu mempunyai kelayakan untuk dipilih menjadi yang di-Pertuan Agung, kecuali jika ia belum cukup umur atau tidak mau dipilih atau bahkan majelis mengira bahwa ia raja yang tidak layak menjadi Yang di-Pertuan Agung.

Yang di-Pertuan Agung yang telah terpilih akan memegang jabatan selama lima tahun. Dia bisa mengakhiri masa jabatan sebelum masa akhir jabatannya dengan menulis surat kepada majelis raja-raja, atau bisa diberhentikan dari jabatan majelis itu. Dia akan berhenti dari jabatan itu jika dia sudah tidak lagi menjadi raja. Istri Yang di-Pertuan Agung diberi

¹Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia*, (Jakarta: Gema Insani : 2008), h.21

gelar Raja Permaisuri Agung dan mempunyai keutamaan setelah Yang di-Pertuan Agung.²

Sebagai seorang kepala negara Yang di-Pertuan Agung merupakan puncak segala kekuasaan di Malaysia, baik kekuasaan dalam membuat undang-undang, kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman. Dia sebagai salah satu dari tiga unsur-unsur parlemen, karena parlemen itu memiliki Yang di-Pertuan Agung sebagai pemimpin dari dua buah majelis, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Agung yang memanggil parlemen supaya bersidang dan dia berkuasa memberhentikan dan membubarkan parlemen. Semua rancangan Undang-Undang (RUU) yang diluluskan oleh kedua-dua majelis parlemen hendaklah mendapat persetujuan dari Yang di-Pertuan Agung sebelum menjadi Undang-undang. Dia berhak berpidato kepada kedua majelis parlemen secara bersamaan atau terpisah. Sebagai ketua pemerintah, Yang di-Pertuan Agung berhak untuk memerintah terhadap negara walaupun hak ini dilaksanakan oleh Menteri Besar masing-masing negara tersebut.³

Setiap negara sekutu biasanya mempunyai badan perundangan yang terdiri dari dua majelis, yaitu Dewan Rendah dan Dewan Tinggi. Dewan Negara di Malaysia adalah Dewan Tinggi, pentingnya Dewan Tinggi itu dibentuk untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) dengan lebih terperinci dan teliti dari pada Dewan Rendah yang membahas permasalahan kepentingan umum. Dengan demikian Dewan Anggota

²Tun Salleh Abas, *Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia*, (Ampang/Hulu Klang Selangor Darul Ehsan : Dewan Sdn Bhd, 2006), cet.III, h. 169

³*Ibid*,h. 175

Rendah biasanya dipilih untuk mewakili masyarakat, maka Dewan Tinggi dibentuk supaya mewakili negara-negara dalam persekutuan dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Dengan demikian dianggap bahwa pembentukan parlemen yang amat penting karena anggota-anggota dewan rakyat dipilih oleh masyarakat melalui pemilu. Anggotanya terdiri dari 11 provinsi/negara di Malaysia termasuk Sabah dan Serawak. Ketika menjadi ahli dewan rakyat Yang di-Pertuan Agung membubarkan parlemen serta mengadakan pemilu.⁴

Konstitusi persekutuan hanya mensyaratkan seseorang itu layak untuk dilantik menjadi Perdana Menteri apabila ia seorang warga negara Malaysia, menjadi ahli dewan rakyat dan mendapat kepercayaan lebih dari separuh ahli dewan tersebut. Ini bermakna perlembagaan persekutuan memberikan kelayakan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianutnya asalkan memenuhi syara-syarat yang ditetapkan. Oleh karena itu orang Islam dan non Muslim sama-sama layak menjadi Perdana Menteri.

2. Penerapan Multi Partai di Malaysia

Partai politik merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk menjalankan program-programnya. Partai politik biasanya mempunyai asas, tujuan, ideologi, visi dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. Partai politik

⁴*Ibid*, h.180

juga mempunyai pengurus dan jajarannya.⁵ Adapun Roger F Saltou mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.⁶ Dengan mengacu pada dua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Sistem multi partai yaitu salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Heywood berpendapat bahwa sistem partai politik merupakan sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Untuk mempermudah dalam memahami sistem partai politik menurut Heywood kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter “jumlah partai politik” untuk menentukan tipe sistem partai politik, pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954 dimana

⁵<http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintahan.html> diakses pada tanggal 15 April 2019 Pukul 10.52 WIB

⁶<http://beritasore.com/2008/07/11/multi-partai-cerminkan-asas-politik-homo-homini-lupus/> diakses pada tanggal 15 April 2019 pada pukul 11.00 WIB

Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai.⁷

Dari definisi yang diperkenalkan oleh Duverger tersebut kita dengan mudah menentukan sistem partai politik di sebuah negara. Jika di negara tersebut hanya terdapat satu partai politik yang tumbuh atau satu partai politik yang dominan dalam kekuasaan maka dapat dipastikan bahwa sistem tersebut merupakan sistem partai tunggal. Namun jika terdapat dua partai politik maka sistem partainya adalah sistem dua partai. Sebaliknya, jika di dalam negara tersebut tumbuh lebih dari dua partai politik, maka dikatakan sebagai sistem multi partai. Santori menyatakan bahwa hal terpenting dari sebuah sistem kepartaian yaitu sebuah pengaturan mengenai hubungan partai politik yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan, dan secara lebih spesifik apakah kekuatan mereka memberikan prospek untuk memenangkan atau berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintahan.

Adapun penerapan sistem multi partai, misalnya Janos Simon menyebutnya sebagai fungsi sosialisasi politik, fungsi mobilisasi politik, fungsi representasi politik, fungsi partisipasi politik, fungsi legitimasi sistem politik. Sementara penjelasan apa yang disebut oleh Janos Simon yaitu seperti berikut⁸:

⁷<http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintahan.html> diakses pada tanggal 15 April 2019 pada pukul 10.57 WIB

⁸John L. Posito dan John O. Voll, *Islam and Democracy*, edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, (Bandung: Mizan, 1999), cet.1,h.180

1. Fungsi sosialisasi politik mulai signifikan ketika seseorang sudah mampu menilai keputusan dan tindakannya. Orang tersebut kemudian mencari “figur” yang dianggap mewakili norma-norma dan nilai-nilai yang dianutnya.
2. Fungsi mobilisasi yaitu fungsi partai politik untuk membawa warganegara ke dalam kehidupan publik. Tujuan dari mobilisasi ini adalah : mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok yang termobilisasi; mengelaborasi program-program untuk menurunkan ketegangan tersebut, dan sebagai hasilnya kelompok-kelompok tersebut mengalihkan dukungannya kepada partai politik.
3. Fungsi partisipasi yaitu fungsi partai politik untuk membawa warganegara agar aktif dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan partai politik kepada warga negara adalah kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, dan demonstrasi.
4. Fungsi legitimasi mengacu kepada kebijakan partai politik untuk mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintahan maupun eksistensi sistem politik.
5. Fungsi representasi yaitu fungsi klasik partai politik. Partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara, akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen. Anggota partai

yang masuk kedalam parlemen ini membawa fungsi representasi dari warga negara yang memilih partai tersebut.

Sementara penerapan multi partai di Malaysia, pertama-tama mengikuti sejarah pembentukan partai-partai yang ada di sana yang telah muncul sejak zaman sebelum kemerdekaan negara Malaysia. Pada awalnya antara partai yang terbentuk merupakan partai yang mendukung untuk melawan semangat penjajahan Inggris, sebagai contoh partai politik yang menyokong semangat nasionalisme seperti partai UMNO yang berdiri sejak tahun 1948, sementara PAS terbentuk pertama kali pada tahun 1951.

Semua partai-partai memiliki semangat kebangsaan atau Islam sudah muncul sebelum kemerdekaan negara Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957.⁹ Pada awalnya kedudukan masyarakat melayuterhadap partai politik banyak tercurahkan dalam pemilihan partai, maka saat itu secara umum munculnya sistem multi partai bukanlah desakan dari pihak Inggris semata-mata tetapi faktor sosialisasi mendorong kearah terbentuknya sistem multi partai di sana. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah pada saat itu, yaitu pihak Inggris mengesahkan agar sistem multi partai berlaku di Malaysia dan sesuai dengan yang diletakan di dalam konstitusi atau perlembagaan persekutuan.

Kedua filosofi penerapan sistem multi partai di Malaysia yaitu melihat dari sudut geografis dan penduduknya, sangat sesuai

⁹Saifullah, *Op.Cit*, h. 68

diterapkan multi partai karena negaranya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yaitu sekitar 28 juta jiwa penduduk, dan luasnya sekitar 2.257 km, sementara luas kawasan yang berbatasan dengan Kalimantan sekitar 565 km, sementara agama, ideologi, dan pemikiran disana adalah politik pluralisme moderat dan bukan pluralisme terpolarisasi.

Adapun apa yang dimaksud pluralisme moderat yaitu setiap pendukung partai politik tidak banyak perilaku permusuhan atau pertikaian disebabkan perbedaan ideologi kepartaian. Jadi apa yang berlaku di Malaysia, setiap partai yang menang di dalam pemilihan umum maka dijadikan sebagai partai pemerintah, sementara partai yang kalah menjadi oposisi. Ini sesuai dengan sistem pemerintahan di sana yang menerapkan sistem monarki konstitusional atau konsep pemerintahan parlementer. Maka hal ini setiap partai yang berlaku di Malaysia tidak banyak berlaku perpecahan dikalangan ormas atau organisasi masyarakat yang terlibat secara langsung dalam politik atau tidak disebabkan penerapan multi partai di sana.¹⁰

Kesimpulan yang dapat dijelaskan adalah, penerapan multi partai di dalam suatu negara bukanlah suatu perkara mudah, karena hal ini ditinjau dari banyak aspek, diantaranya kedudukan sosial, politik, dan sebagainya. Keduanya melihat doktrin, pemikiran di dalam sejarah masyarakat suatu negara. Maka apa yang terkait permasalahan ini di

¹⁰*Ibid*, h.60

Malaysia yaitu sama dengan yang disebutkan dalam paparan diatas. Agar pembahasan ini lebih terperinci , maka akan di jelaskan pemikiran politik Islam Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat terhadap hal-hal yang terkait dengan sistem pemerintahan di Malaysia, khususnya negara bagian Kelantan, seperti hubungan kepartaian dengan hukum Islam dan sebagainya.

B. Pemikiran Politik Islam Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat

Jika dilakukan penelitian peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah kemanusiaan, maka tidak dikesampingkan peran intelektualisme di dalamnya. Termasuk juga didalamnya peran tokoh pemikiran yang akan memberikan sebuah *progress* terhadap kemajuan kebudayaan sebuah negara. Hal ini juga berlaku terhadap seorang tokoh di negeri bagian Kelantan, yaitu Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat. Demikian penting pemikirannya dalam perjalanan perkembangan negeri Kelantan, sehingga sangat mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kelantan.

Kerajaan Kelantan di bawah pimpinan Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat terus menerus menjadi fokus utama para pengamat politik, para intelektual serta pencinta pergerakan Islam. Hal ini disebabkan karena negeri bagian Kelantan merupakan salah satu negeri bagian yang dikuasai oleh PAS. PAS sebagai partai politik yang menang pemilu di suatu negeri bagian, maka PAS akan menguasai pemerintahan dan hal ini juga akan

berpengaruh pada kebijakan politik, yaitu sudah menjadi kenyataan bahwa di negara manapun setiap partai yang berkuasa akan memegang peranan penting dalam pemerintahan dan perpolitikan, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada ketetapan politik yang dihasilkannya.

Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat merupakan seorang tokoh PAS yang menjabat sebagai Menteri Besar (Gubernur) Kelantan. Semenjak ia berkuasa di Kelantan, perubahan terus dilakukan sesuai dengan kehendak ajaran Islam yang menjadi dasar perjuangan PAS. Untuk melakukan perubahan tersebut, ia melakukan langkah-langkah dengan mengambil atau membuat pemikiran dalam bidang politik.

Ada beberapa pemikiran Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dalam rangka melakukan perubahan-perubahan dengan melihat bagaimana pengaruh pemikiran PAS dalam pemikiran tersebut sebagai partai politik yang berkuasa di negeri Kelantan.

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz kembali ke Malaysia dari Mesir pada tahun 1962, kemudian dia menjadi guru disekolah agama milik ayahnya. Dia mulai bergabung dengan partai Islam Se-Malaysia (PAS) 1967 ketika itu dia berfikir bahwa tidak bisa berdiam diri di saat terjadinya banyak konflik alim-ulama ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah pada tanggal 13 Mei 1969.¹¹ Sejarah asal usul PAS resmi berdiri pada tanggal 23 Agustus 1951. Namun jika menyusuri sumber lain, ada yang mengatakan PAS diresmikan pada tanggal 26 November 1951 dan pada Koran Utusan Melayu,

¹¹Mohd Aizat Mohd.Salleh Al-Hafiz, *Pemikiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat Dalam Kenangan*, (Selangor : Pts Publishing House Sdn. Bhd, 2011), h. 36

dinyatakan pada tanggal 25 November 1951. Meskipun terdapat berbagai sumber yang berbeda mengikuti tokoh-tokoh sejarah lama PAS, sumber kedua pada tanggal 26 November 1951 merupakan tanggal kepastian PAS berdiri.

PAS kemudian didaftarkan sebagai sebuah organisasi pada tanggal 31 Mei 1955 dengan nomor pendaftaran 733 (Penang). PAS merupakan organisasi atau partai politik Melayu yang berlandaskan kepada Islam yang didirikan sebelum Negara Malaysia merdeka, sesudah didirikannya *Hizbul Muslimin* yang dilarang atau diharamkan oleh penjajah pada tahun 1948. Latar belakang berdirinya PAS golongan reformasi tidak hanya berhasil menyadarkan masyarakat Melayu tentang betapa pentingnya menghapus penjajahan Barat untuk mewujudkan sebuah Negara Islam, tetapi juga menyuarakan pendapat bahwa kelemahan umat Islam sebenarnya adalah bersumber dari masyarakat Islam yang tidak mengikuti ajaran Islam dengan benar, sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam usaha mereka untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kembali kepada Islam, pada tahun 1906 mereka berhasil menerbitkan sebuah majalah di Singapura yang diberi nama Al-Iman. Lalu pada tahun 1925 terbit Koran Edaran Zaman di Penang, majalah Al-Ikhwan pada tahun 1926 dan majalah Suara pada tahun 1928. Dengan terbitnya Koran dan majalah tersebut, golongan ini telah berhasil memicu Revolusi Intelektual di kalangan masyarakat Melayu dan bibit-bibit kesadaran yang ditanamkan itu telah mendorong masyarakat Melayu untuk mendirikan beberapa

organisasi guna memajukan bangsa Melayu dan umat Islam untuk tahun-tahun berikutnya.¹²

Melalui MATA dalam rapat umum tahunan telah berhasil melahirkan *Hizbul Muslimin* pada tanggal 14 Maret 1948. Tujuan PKMM melahirkan *Hizbul Muslimin* yaitu sebagai sayap untuk mengumpulkan semangat para ulama. Sebagai sebuah partai Islam pertama di Malaysia, *Hizbul Muslimin* yang dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar al-Baqir memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan negara yang berdaulat untuk membentuk sebuah masyarakat yang berlandaskan kepada pemahaman Islam serta mewujudkan sebuah Negara Islam atau Darul Islam. Namun *Hizbul Muslimin* berakhir pada tahun 1948 ketika Inggris bertindak mengharamkan, disamping menangkap pimpinan partai *Hizbul Muslimin* termasuk di dalamnya Abu Bakar al-Baqir.

Meskipun kegiatan dari partai *Hizbul Muslimin* terhenti, namun semangat dukungan rakyat khususnya alim ulama terhadap perjuangan politik partai tersebut sangatlah mengesankan. Semangat dan dukungan kuat inilah yang akhirnya merintis jalan mudah menuju pembentukan PAS pada tahun 1951. Peranan *Hizbul Muslimin* dalam pembentukan PAS lebih terlihat ketika sebagian besar dari mantan pimpinan pusatnya ikut berpartisipasi dalam PAS dan berperan secara aktif, di antaranya Ustadz Othman Hamzah, Ustadz Baharuddin Abd. Latiff, Tuan Haji Khaider Khatib dan Ustadz Yunus Haji Yatimi.

¹²<http://indonesia.peradaban.web.id/Partai-Islam-Se-Malaysia-Jurnal-Online> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pada pukul 13.00 WIB

Pada tahun 1967, Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dipilih sebagai calon PAS untuk mengisi kekosongan kursi Parlimen, akibat wafatnya Haji Ahmad Abdullah atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Haji Ahmad Prai karena kecelakaan. Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat memenangi dengan suara sebanyak 11.855 sekaligus mengalahkan lawannya Tengku Nor Asiah Tengku Ahmad dari calon partai Perikatan. Pada pemilihan raya umum tahun 1969 Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menang lagi dengan mayoritas suara 4814 dengan mengalahkan calon dari partai Perikatan yaitu Mohd Salleh Ibrahim dalam Parlimen Kelantan Hilir. Meskipun demikian Kelantan Hilir telah berpindah ke Parlemen Pangkalan Chepa.

Pada pemilu tahun 1974 Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat tetap bertahan dalam kursi Pangkalan Chepa dengan mayoritas suara sebanyak 8561 mengalahkan Omar Ibrahim calon dari Partai Bebas. Kelantan mengalami krisis politik yang menyebabkan PAS kehilangan kekuasaannya dalam pemilu DUN Kelantan yang dibuat secara terpisah pada tahun 1978. Hal itu tidak lama, karena Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat bisa mempertahankan kedudukannya pada pemilu selanjutnya dengan mengalahkan calon dari partai BN Mohd Nor Ali dengan suara sebanyak 1978. Lalu pada pemilu tahun 1982 Partai BN yang diwakili oleh

Hassan Harun turut kalah dengan sebanyak suara yang dimenangi Tuan Guru Dato' Hjai Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat sebanyak 5342¹³.

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat selama hampir 23 tahun menjadi ahli Parlemen dia tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip Islam hingga akhir hidupnya. Pada tahun 1978 dia dilantik menjadi Pesuruh Jaya PAS Negara Kelantan. Pada pemilu tahun 1986 dia diberi kepercayaan untuk bertanding di dua kursi yaitu Dun Semut Api dan Parlemen Bachok, dan dia kalah di Parlemen Bachok namun menang di Dun Semut Api. Pada pemilu 1990, PAS bergabung dengan Angkatan Perpaduan Ummah dan bisa membentuk kerajaan, dan Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dipilih sebagai Menteri Besar (Gubernur). Dasar Membangun Bersama Islam menjadi dasar pemerintahan negeri Kelantan sehingga hari ini merupakan hasil pemikiran dia ketika awal memerintah negeri Kelantan, hingga saat sekarang ini masih dilanjutkan oleh Menteri Besar Kelantan yang baru.

Dengan berpolitik Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menjadikannya sebagai sebuah alat atau perantara untuk mencapai dakwah Islamiyah yang maksimal di negeri Kelantan. Demikian juga dengan berdakwah dia menyampaikan agenda politik yang bertujuan pada kepentingan agama dan umat manusia. Pemikiran Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang dia pelajari serta pengalaman selama berada di luar negeri untuk menuntut ilmu. Demikian juga

¹³Che Samsudin Mohamed Noor, *Suara Di Parlimen Pemikiran Tok Guru Mendahului Zaman*, (Kelantan : Humais Production, 2016), h. 21

dengan pemikiran Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat yang berkaitan dengan politik, karena sewaktu dia belajar di Darul Ulum, Deoband dia berteman dengan pejuang kemerdekaan India.

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat berpendapat bahwa ia bertanggung jawab memastikan ajaran Islam sebagai bentuk kewajiban untuk berdakwah. Dia mempunyai dua tujuan, yaitu; pertama menjaga dan mendaulatkan Islam (*Hirasah al-Din*), yakni dengan menegakkan ajaran Islam dan menghapus kemungkaran di muka bumi. Contohnya seperti *bid'ah* yang merupakan idiologi pemikiran modern yang bertentangan dengan Islam. Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menegaskan untuk menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan tertinggi. Kedua: memerintahkan segala hal yang berkaitan dengan kerajaan harus berlandaskan ajaran Islam (*Siyasah al-Dunya bihi*) contohnya seperti urusan keuangan, sosial, pembangunan infrastruktur, tanah, pertanian, perhutanan dan sebagainya. Dia juga menghapuskan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam di dalam pemerintahan dan didalam aktivitas kemasyarakatan, seperti menghapus izin perjudian.¹⁴

1. Ciri-ciri Kepemimpinan

Menurut Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz untuk melahirkan para pemimpin dan pegawai kerajaan yang terampil dalam politik haruslah mengatur penghayatan kerohanian secara teratur melalui program *tadarus* sepanjang bulan Ramadhan, melibatkan Menteri Besar, Para Exco,

¹⁴Shukeri Mohamad Dkk, *Aplikasi Syariah Dalam Petadbiran Kerajaan Kelantan Dari Tahun 1990 Hingga 2013 : Satu Analisis*, Volume 6, No. 1, pp : 141-155, Desember 2016, h. 143-144

pegawai kerajaan dan seluruh lapisan masyarakat. Dia juga ingin menanamkan budaya pengkajian dan penambahan ilmu kepada para pegawai kerajaan sebagai kewajiban dalam pengurusan kantor, karena ilmu dan iman dapat membimbing hati dan jiwa mereka kepada pembangunan diri yang benar. Untuk mengukuhkan kesadaran rohani tersebut Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menganjurkan adab pertemuan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan diawali membaca Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat Al-Asr. Dalam menjalankan aktivitas resmi Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat melatih para pemimpin dan pegawainya menghormati waktu sholat, dan rapat dilaksanakan setelah sholat. Para pemimpin kerajaan dijaga supaya tidak terjerumus kedalam perilaku yang buruk seperti korupsi.

2. Prinsip Sistem Pemerintahan

Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menetapkan prinsip sistem pemerintahan sejak awal dia memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kelantan, yaitu pada tahun 1990 seperti *Ubudiyyah*, *Masuliyyah* dan *Itqan*. Prinsip itu diterapkan terhadap para pegawai kerajaan, dengan tujuan supaya menjadi acuan bagi pegawai kerajaan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Tiga prinsip pegawai yaitu:

- 1) *Ubudiyyah* : dalam masalah kepemimpinan dan pegawai kerajaan, mewajibkan menjalankan tugas sebagai satu tanggung jawab mengabdikan diri kepada Allah SWT (beribadah kepada Allah) bukan

karena untuk mendapatkan gaji. Oleh karena itu mereka wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam. *Ubudiyyah* (Pengabdian terhadap Allah), *Ubudiyyah* dalam bekerja semata-mata karena Allah dengan meletakkan setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah yang akan memperoleh pahala di akhirat. Bekerja akan mencapai tahap ibadah apabila dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama.

- 2) *Mas'uliyah* :Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menjelaskan bahwa kerajaan merupakan penghubung , sebenarnya tanggung jawab kita kepada Allah SWT. Seorang pemimpin atau pegawai perlu menyadari bahwa tugasnya bukanlah satu peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi merupakan satu amanah yang berat untuk menjaga kepentingan masyarakat. Karena itu mereka tidak boleh melakukan penipuan, penghianatan, kezaliman, korupsi, dalam menjalankan tugasnya.
- 3) *Itqan* : artinya serius atau bersungguh-sungguh dan *istiqamah*. Pegawai dan pimpinan kerajaan harus menjalankan tugas dengan baik, untuk menjamin hasil dan kejayaan yang cemerlang. Setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian diri hari ke hari dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan urusan pekerjaannya, sehingga dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.

3. Subjek Politik

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat membuka nalar berfikir masyarakat bahwa pemikiran yang ditanamkan ideologi *British* yaitu bertentangan dengan politik Islam itu sendiri. Pemahaman yang diajarkan oleh Inggris melekat kuat ke dalam pemikiran umat Islam, tidak hanya umat Islam di Negara Malaysia tetapi umat Islam di seluruh dunia. Dampak dari pemahaman Inggris lahirlah kalangan umat Islam yang melarang persoalan politik dibicarakan dalam khutbah Jum'at karena dikatakan bukan urusan agama. Hal-hal politik hanya boleh diceritakan diluar Masjid. Melalui peristiwa ini maka menular penyakit yang memisahkan Masjid dan politik atau yang disebut dengan politik suku agama. Dizaman Rasulullah tidak terdapat dua jenis khutbah Jum'at tersebut, yaitu untuk politik di luar Masjid dan untuk agama didalam Masjid. Rasulullah bahkan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hidup maupun yang bersifat politik atau sebaliknya hanya dalam satu khutbah saja.¹⁵

4. Objek Politik

Objek politik dapat diartikan sebagai apa yang menjadi target dari kepemimpinan dan kekuasaan politik. Hal ini bisa terdiri dari Negara, Masyarakat, tanah air, dan Undang-Undang. Ketika berbicara objek politik, maksudnya yaitu siapa, atau apa yang dipimpin terhadap kepemimpinan seseorang.

¹⁵Nik Mohamad Abduh, Riduzan Mohamad Nor, *Hikmah Yang Mengalir Dari Pada Sang Murabbi*, (Jundi Resources, 2012), h.221

Objek dari politik Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat yaitu terdiri dari beberapa unsur yang berkaitan langsung dengan negara yakni negeri Kelantan, yang berkaitan dengan masyarakat tentu masyarakat Islam baik dari kalangan masyarakat Melayu asli, maupun masyarakat imigran muslim yang datang ke negeri Kelantan. Kemudian masyarakat yang non Muslim pun menjadi objek politik Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat karena masyarakat non Muslim mempunyai hak yang sama dengan masyarakat Muslim yang bernegara di wilayah Kelantan sesuai dengan peraturan Islam yang berlaku di negeri tersebut.

Objek dari politik Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- 1) Negeri Kelantan yang merupakan wilayah kekuasaan politiknya dan menjadikan Kelantan sebagai objek politik sesuai dengan visi kepemimpinannya.
- 2) Beberapa Undang-Undang atau peraturan yang masih mengarah kepada hal-hal yang dilarang Allah SWT , diubah menjadi Undang-Undang yang sesuai dengan Syari'at Islam.
- 3) Masyarakat Muslim dan non Muslim.

5. Media politik

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dalam agenda dan sosialisasi dalam kepemimpinannya sebagai Menteri Besar Kelantan, ia menggunakan berbagai media. Alat dakwah yaitu media seperti media

massa, jurnal, radio, tv, ceramah, dan juga buku. Melalui media inilah Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat melakukan terobosan dalam memberikan informasi terkait dengan program pemerintahannya. Ada tiga media politik yang digunakan yaitu :

- 1) *Harakah. Harakah Oficial*
- 2) Media Politik merupakan suatu alat untuk menyampaikan agenda, plan, visi dan misi politik
- 3) Media massa atau sosial dan *Facebok* juga digunakan.

6. Materi Politik

Politik Hassan Al-Banna menjadi inspirasi pemikiran Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat. Dalam hal ini teori dan materi dakwah dan politiknya dipengaruhi oleh sebagian materi politik yang diterapkan oleh Hassan Al-Banna di Mesir dalam organisasi Ikhwanul Muslimin. Pengaruh ini didasari ketika Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat belajar ke Pakistan dan banyak membaca buku karangan dari Hassan Al-Banna seperti kitab Risalah Dakwah Hassan Al-Banna yang berbicara tentang politik Islam.¹⁶

Materi politik Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat berorientasi kepada negara dan kecintaan terhadap bangsa sebagai masyarakat wilayah negeri Kelantan yang menjadi titipan Allah SWT untuk mengelolanya dengan baik. Berbuat kebaikan dengan melalui

¹⁶Jurnal karangan Ahmad Izahan Ibrahim dan Engku Ahmad Zaki Engku Alwi yang berjudul *Pemikiran Politik Hassan Al-Banna, Syed Qutb Dan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat : Satu Analisis* yang diterbitkan oleh Asian People Journal (APJ) eISSN : 2600-8971, Volume 1, Issue 1 (2018), PP 214-223, h. 219

Politik Islam yang mampu mengarahkan ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan kepemimpinan seperti ini dia menyesuaikannya dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya : “ Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat “ sesungguhnya Aku akan menciptakan khalifah (pemimpin) di muka bumi” (QS. Al-Baqarah :30)

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat sangat memahami dan menghargai semua bangsa dan diterapkan dalam politiknya. Maksudnya Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat tidak pernah membedakan dari bangsa mana atau suku mana objek yang dipimpinnya, karena bagi dia semua sama disisi Allah SWT. Dalam penerapan sistem kepemimpinannya dia selalu menerapkan kasih sayang dan kepedulian antar sesama makhluk Allah SWT di muka bumi. Kepemimpinan Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat tidak jauh berbeda dengan *Manhaj* kepemimpinan Hassan Al-Banna, pengaruh ini justru karena dia pernah belajar di Universitas Al-Azhar Mesir yang pada saat itu dibawah pemerintahan King Abdul Azizdan sekretarisnya Anwar Sadat.*Manhaj* yang dibawa oleh Ikhwanul Al-Muslimin ini jadikan ideology, walaupun dia tidak pernah terlibat dalam organisasi atau gerakan di Mesir pada saat itu.¹⁷

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat juga terang-terangan dalam menyuarakan nilai-nilai Al-Qur'an. Dia bukan saja mengamalkan dan mengajak masyarakat Malaysia khususnya masyarakat

¹⁷Habibul Izzah Ahmad, *Tok Guru Sebuah Biografi Awal*, (Kota Bharu Kelantan: Vinlin Press Sdn Bhd, 2014), h. 162

Kelantan. Di Pulau Melaka, kehidupan serta pemikirannya sama dalam politik dan sebagai layaknya dia diberi gelar sebagai ahli hadis.¹⁸ Bahkan jika dilihat sejarah sebelum Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat terjun ke dalam politik menunjukkan bahwa dia seorang yang sangat berpegang dengan *sunnah*. Gagasan politik yang dibawanya juga berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, jihadnya yaitu untuk mengembalikan masyarakat kepada Islam¹⁹. Ada tiga materi atau isi politik yang menjadi gagasan dari Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat yaitu:

- 1) Menyuarakan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Politik yang diterapkan berdasarkan Syari'at yaitu politik warisan Rasulullah SAW.
- 3) Berpolitik merupakan untuk memperbaiki keadaan atau hal *ikhwal umat*.

Dalam kiprah politiknya, Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menjadikan politik sebagai media atau jalan untuk memperbaiki kedupan masyarakat dan Negara. Inilah alasannya dalam menjalankan politik negeri Kelantan. Setiap Undang-undang dan kebijakan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

¹⁸Artikel yang dibuat dalam rangka seminar pemikiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz di Gua Musang, Kelantan oleh Nik Yusri bin Musa, “ *Haji. Nik Abd Aziz Bin Nik Mat : Pandang Sisi Sebagai Ulama Hadis*” di akses dari web <http://umkeprints.umk.edu.my/598/1Paper%202.pdf> di akses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 11.00 WIB

¹⁹Nik Yusri bin Musa dalam web <http://umkeprints.umk.edu.my/598/1/Paper%202.pdf> diakses pada tanggal 1 Februari 2019 Pukul 11. 00 WIB

7. Strategi Politik

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dalam membina strategi politik kerajaan negeri Kelantan, menggunakan kerangka politik Islam yang bertentangan dengan sistem demokrasi Barat yang menjadi arah sistem Negara Malaysia. Dalam kondisi pertempuran dengan sistem politik negara, dia menggunakan berbagai sarana kebijaksanaan untuk meraih sukses agar Islam dapat ditegakkan di bumi Kelantan. Secara otomatis jika Islam dapat dihidupkan dan kerajaan sekular sulit mengalahkan pemerintahan PAS melalui pemilu seterusnya. Dalam mencapai misi tersebut Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menghadapi serangan hebat terutama kerajaan Malaysia yang dikepalai oleh perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Dia ditantang dari berbagai media perdana, bagian keuangan, layanan yang tidak adil dan sebagainya. Namun tantangan tersebut sama sekali tidak menggoyahkan pendiriannya dalam mewujudkan *Siyasah Syar'iyah* dalam sistem politik modern.²⁰

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menggunakan strategi politik di negeri Kelantan merupakan sebuah langkah politik yang tidak bisa dilepaskan dari dakwahnya. Maksudnya, strategi politik Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat merupakan cerminan dari pemikiran dakwahnya. Ada tida strategi politiknya yaitu:

²⁰Pdf Prof. Madya Dr Shukeri Mohamad dan Dr Mohamad Azrien Mohamed Adnan yang berjudul, *Tok Guru Nik Aziz Pencetus Siasah Syar'iyah Dalam Sistem Politik Modren*, yang di terbitkan Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016, h.7

- 1) Merangkul semua golongan dari masyarakat Kelantan. Hal ini merupakan strategi politik Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dalam mewujudkan dan menciptakan keadilan bagi semua masyarakat Kelantan.
- 2) Sebagai seorang Da'i Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menggunakan jabatan politiknya sebagai jalan untuk berdakwah. Dalam kegiatan politik yang dilakukannya di Kelantan, hal yang paling utama yaitu merumuskan dan merubah Undang-Undang Barat yang tidak sesuai dengan masyarakat Kelantan dan dengan Undang-Undang Islam.
- 3) Tuan Guru Dato' haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat memberikan penyadaran bagi masyarakat Kelantan dengan membuat institusi keadilan yang mempunyai tujuan untuk membela hak-hak masyarakat Kelantan dan nilai-nilai Islam.²¹

C. Hubungan Pemikiran Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dengan Tokoh Lainnya.

Secara umum ditinjau dari sudut sejarah, pemikiran Islam sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu pada saat sahabat berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu terutamanya dalam masalah fiqih, tetapi ruang lingkup ijtihad masih berada di bawah naungan wahyu, maka secara formalnya pintu ijtihad itu berakhir dengan keluarnya keputusan wahyu, yaitu

²¹Ismail Yusoff, *Tuan Guru Nik Abdul Aziz Pemikiran Agama dan Politik*, (Sintok Kedah : UUM Press, 2015 h. 181-182

saat pertemuan para sahabat dengan Rasulullah SAW untuk bertanya beberapa masalah dalam mengenai hal-hal tertentu maka Rasulullah memberi penjelasan atau jawaban dengan berpedoman pada wahyu. Saat wafatnya Rasulullah SAW, secara umum pintu ijtihad sudah mulai terbuka yang terjadi dikalangan para sahabat besar seperti pemikiran *Kufah* terpengaruh dengan pemikiran Umar bin al-Khatab, Ali bin Abi Thalib, dan sebagainya. Sementara dikawasan Hijaz seperti Mekah dan Madinah, antara pemikiran yang terkemuka seperti Ibnu Abbas, Aisyah r.a dan banyak lagi yang tidak tercatat. Setelah berabad-abad berlalu, sejarah Islam menunjukkan peradaban Islam yang banyak pemikiran-pemikiran Islam seperti pemikiran Teologi (ketuhanan), pemikiran fikih, pemikiran filsafat dan pemikiran tasawuf.

Maka dapat disimpulkan pemikiran Islam tidak terlepas di dunia Islam khususnya pada saat ini negeri bagian Kelantan, Malaysia. Menurut Abdur Rahman bin Abdullah di dalam bukunya “pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Alirannya” menjelaskan bahwa di Malaysia, pemikiran yang terdapat di sana sama dengan dunia Islam yang lain yaitu, seperti pemikiran Islam Tradisional, non-tradisional, modern, non-modren, reformis, idealis, sekuler, liberal, progresif, fundamentalis, konservatif, dan ortodoks. Maka kesimpulannya, disini akan dijelaskan fondasi pemikiran Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dan perbandingannya pemikiran Islam yang lain terkait dengan masalah politik.²²

²²Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia Searah dan Alirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet 1. H.13

Pemikiran Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dalam hal masalah politik mengarah pada pemikiran Hassan al-Banna dan Syed Qutb yang mengutamakan kepentingan Islam dalam *pentadbiran* sebuah negara. Ini adalah bersamaan dengan konsep yang telah diwariskan oleh Rasulullah S.A.W. dan para *khulafa alRasyidin*. Walaupun zaman bertambah maju dan moderen, kewujudan negara Islam masih relevan untuk dilaksanakan. Seluruh umat Islam wajar sekali bangkit untuk menegakan Islam dalam kehidupan agar tegaknya syariat Allah di muka bumi. Sementara hukum yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat terkait masalah politik seperti hak-hak asasi manusia yang membahas mengenai masalah hak hidup, hak kebebasan, hak kebebasan wanita, hak ilmu pengetahuan dan pendidikan, hak kedudukan Non-Muslim di Kelantan dan islamisasi Kelantan antara idea dan realita, undang-undang Islam dan undang-undang *Jinayah* seperti hukum acara pidana dan hukum *hudud*.²³

Perbandingan pemikiran politik Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dengan pemikiran tokoh-tokoh modern di Malaysia. Menurut Abdur Rahman bin Abdullah pemikiran modern disebut didalam bukunya yaitu menurut Roger Garaudy, modernisme tidak lain adalah *westrenisme*, yakni berlandaskan kebudayaan dan pemikiran barat modern yang timbul dari pengalaman sejarah mereka selama empat abad terakhir. Sedangkan ciri-cirinya yaitu nasional, kapitalis, dan sistem parlemen. Prof. Hamid Algar menegaskan bahwa mereka telah mengabaikan kontradiksi pokok antara

²³Jamal Mohd Lokman Sulaiman, *Op.Cit*, h. 127

mentalis modern dan agama, Islam berada pada realitas imperativ dari Allah Yang Maha Kuasa, sedangkan dunia modern sebaliknya cenderung untuk menyangkal realitas Ilahi secara aktif terhadap alam dan manusia.²⁴

Pemikiran modern di Malaysia seperti Dr. Mahathir Mohamad, dan Dr. Candra Muzafar, menurut Abdul Rahman pemikiran Dr Mahathir Mohamad merupakan fondasi kearah pemikiran relativisme dan memandang dinamis setiap hukum Islam, sehingga batasnya berpadu dengan konsep pemikiran idealisme. Jadi dalam hal politik, pemikiran Dr Mahathir Mohamad banyak mengeluarkan pandangan kearah sekuler moderat, yaitu agama dengan politik tidak berlaku pemisahan secara radikal seperti berlaku pada pemikiran politik Barat, sementara kedudukan Islam dalam pemerintahan Malaysia mestilah memandang konsep idealisme yaitu ayat-ayat Al-Qur'an tentang ketatanegaraan Islam haruslah diinterpretasikan sesuai pada saat zaman dan tempat khususnya di Malaysia.²⁵

Kesimpulan yang dapat dilihat antara pemikiran Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dengan Dr. Mahathir Mohamad secara jelas banyak perbedaan, mulai dari dasar-dasar atau masalah yang terkait dengan politik, seperti pandangan Dr. Mahathir Mohamad yang tercermin pada undang-undang di dalam negara Malaysia, yang hanya relevan menurut tafsiran Barat di dalam sistem *commom law*. Sementara pandangan Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat secara jelas menolaknya, dia lebih menekankan pada aspek-aspek Islam, adapun masalah ketatanegaraan

²⁴Hamid Algar, *Islam dan Tantangan Intelektual dari pada Kebudayaan Modren*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), cet.1, h.25

²⁵Abdul Rahman Haji Abdullah, *Op.cit*, h.173

Islam di Malaysia menurut Dr. Mahathir Mohamad sangat relevan jika diterapkan sistem pemerintahan Barat, seperti sistem demokrasi, sistem partai politik, dan sebagainya. Sementara pandangan Tuan Guru Dato Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat tidak sama pandangannya dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Dr Mahathir Mohamad.

Kesimpulan yang terdapat dalam perbandingan ini yaitu, munculnya berbagai dasar-dasar pemikiran Islam sehingga terwujudnya banyak kedudukan hukum Islam dalam masalah ketatanegaraan Islam di Malaysia, seperti hukum sistem pemerintahan Barat, seperti halal, haram maka harus sesuai syari'at Islam.

D. Analisis Penulis Tentang Pemikiran Politik Islam Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat

Menurut penulis dari berbagai sumber yang berhasil penulis kumpulkan bahwan pemikiran politik Islam Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat di Malaysia, khususnya negeri Kelantan sangat berdampak baik, itu terlihat dengan berhasilnya dia dalam memimpin negeri Kelantan yang lebih kurang 23 tahun. Politik dalam berdakwah yang dia terapkan berdasarkan ajaran Islam menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat negeri Kelantan, bahkan hampir dalam semua masa kepemimpinannya dilakukan sesuai syari'at Islam. Meskipun kecemerlangan politik dan dakwah Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz di negeri Kelantan bahkan pengaruhnya sampai ke dunia, termasuk media Koran Indonesia pun pernah memuat berita tentang Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat yaitu dalam Koran

Republika Indonesia “Nik Aziz pemimpin Islam ke-42 paling berpengaruh di dunia” dan Ustadzah terkenal Indonesia pun dalam Chanel Youtube Oki Setiana Dewi juga menyiarkan tentang Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat. Bisa dilihat dia tidak hanya dikenal di Malaysia tentang pemikiran Dakwah dan politik bahkan mendunia, meskipun demikian tetap saja Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz mendapat tantangan dari Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohammad, namun itu semua tidak mematahkan semangatnya dalam menegakkan kepemimpinan yang sesuai dengan syari’at Islam.

E. Dampak Pemikiran Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat Terhadap Masyarakat Negeri Kelantan

Pemikiran Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat di negeri Kelantan tidak luput dari pro dan kontra masyarakat setempat. Bagi masyarakat negeri Kelantan secara umum langkah yang diambil oleh Tuan Guru Dato’ Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dalam Islamisasi negeri (negeri Kelantan yang berlandaskan syari’at Islam), merupakan sesuatu hal yang baik dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena mayoritas masyarakat negeri Kelantan adalah penduduk PAS. Masyarakat negeri Kelantan menginginkan hukum Islam diterapkan secara *Kafah*. Dukungan dari masyarakat tersebut terlihat dari adanya kepatuhan mereka dalam mentaati peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kerajaan.²⁶

²⁶Jamal Mohd Lokman Sulaiman, *Op-cit*, h.132

Namun demikian, ada juga masyarakat yang tidak setuju, hal ini merupakan hambatan yang dihadapi oleh Tuan Guru Dato'Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dalam upaya islamisasi negeri Kelantan contohnya ketika dia mengharamkan judi. Terdapat pendapat sesesorang dari perwakilan Partai Semangat 46 yang meminta kerajaan negeri Kelantan mengkaji ulang dasar pengharaman judi tersebut agar orang non muslim seperti orang Cina dan India diperbolehkan untuk melakukan perjudian. Karena perjudian merupakan kesukaan dan kebiasaan orang Cina. Meskipun mendapat tantangan Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat menjelaskan bahwa larangan perjudian tersebut akan dilaksanakan terhadap semua orang, karena perjudian bukanlah tradisi masyarakat Cina.²⁷

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat juga mendapat respon yang baik dari sebagian masyarakat non Muslim dari Cina, India, dan masyarakat Siam, mereka mengakui bahwa perjudian bukanlah tradisi dari nenek moyang mereka. Dan mereka merasa bahwa langkah yang dilakukan Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat merupakan suatu langkah yang baik dan sejalan dengan keinginan kerajaan negeri Kelantan, yang berkeinginan melahirkan generasi yang rajin , mempunyai identitas sendiri dan tidak hanya mengharap nasib semata-mata. Karena pada dasarnya pemikiran Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat yang berlandaskan syari'at Islam dapat memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat negeri Kelantan.

²⁷*Ibid*, h.143

Dengan demikian jelaslah bahwa adanya pro dan kontra pada masyarakat didasarkan pada keberhasilan dalam mengembangkan pemikiran dan pengaruhnya. Memang keberhasilan bagi seseorang kadang kala merupakan kegagalan bagi pihak lain, kemudian karena kegagalan itu mereka berusaha mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain. Yang mana apabila kesalahan dan kelemahan itu tidak ditemukan maka muncul berbagai isu dengan maksud memutar balikkan fakta, hal tersebut juga terjadi terhadap Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat dalam mengembangkan pemikiran Politik Islam di negeri Kelantan.

